

JURNAL
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
WARTAWAN KONTRIBUTOR TELEVISI
(STUDI KASUS TERHADAP TV ONE YOGYAKARTA)



Diajukan Oleh :

Rosa Delima Novita A.

NPM : 110510532

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

JURNAL
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
WARTAWAN KONTRIBUTOR TELEVISI
(STUDI KASUS TERHADAP TV ONE YOGYAKARTA)



Diajukan Oleh :

Rosa Delima Novita A.

NPM : 110510532

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015


HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
WARTAWAN TELEVISI
(STUDI KASUS TERHADAP KANTOR BIRO TV ONE YOGYAKARTA)

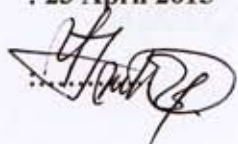


Diajukan Oleh :
Rosa Delima Novita A.

NPM : 110510532
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui

Dosen Pembimbing I	Tanggal	: 23 April 2015
(Dr. V. Hari supriyanto S.H.,M.Hum)	TandaTangan	

Dosen Pembimbing II	Tanggal	: 23 April 2015
(E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum)	TandaTangan	

Mengesahkan
Pj. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

(P.A. Endro Susilo,S.H., LL.M)

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
WARTAWAN TELEVISI
(STUDI KASUS TERHADAP KANTOR BIRO TV ONE YOGYAKARTA)**

Rosa Delima Novita A, V. Hari Supriyanto, E. Imma Indra Dewi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Implementation of health and safety (K3) for a television reporter (case study of the Bureau Tv One Yogyakarta). In carrying out his job reporters are always faced with various risks of work that may occur or be experienced while covering or looking for news. Risks are particularly experienced journalists who were covering the news in the region or regions in conflict can be a work accident such as physical violence, persecution, deprivation camera, harassment and even murder, so there should be protection afforded by media companies to occupational safety and health (K3) reporter. How is the implementation of health and safety (K3) for a television reporter (case study of the Bureau Tv One Yogyakarta). Implementation of health and safety at work Yogyakarta Bureau Tv One cannot meet the provisions of the legislation and have not been able to run well. This study aims to identify and analyze the implementation of health and safety for television journalists (case study of the Bureau Tv One Yogyakarta). Suggestions can be submitted in this research so TvOne Yogyakarta Bureau can meet the implementation of safety and good health according to the Law for all workers.

Keywords: workers, security, work, accidents, journalists, medical health insurance

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Kebebasan berekspresi dapat diwujudkan melalui kesenian, menyampaikan pendapat atau menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan melalui media cetak. Media untuk berekspresi ide-ide maupun pendapat dan penyebarluasan gagasan yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah *pers*. *Pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹ Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan selalu dihadapkan dengan berbagai risiko dari pekerjaan yang mungkin terjadi atau dialami ketika sedang meliput atau mencari berita. Risiko terutama dialami para wartawan yang meliput berita di daerah atau wilayah yang sedang konflik. Risiko yang mungkin dialami wartawan saat menjalankan pekerjaan dapat berupa kekerasan fisik, penganiayaan, perampasan kamera, pelecehan bahkan pembunuhan.

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia No 40 tahun 1990 Tentang *Pers*

Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan harus dijunjung tinggi karena merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan perusahaan media. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F diatur bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak melarang seseorang untuk mencari informasi atau berita demi kepentingan lingkungan sosialnya. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dengan demikian harus ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta)?

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, sedangkan dalam Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan sebagai pemberi kerja, perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja.

Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang

diperjanjikan, dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya ada dua macam perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berakhirnya perjanjian kerja menurut Pasal 61 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :

- a. Pekerja meninggal dunia
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Keselamatan dan kerja merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan karena keselamatan kerja merupakan hal penting yang wajib dipenuhi oleh pengusaha selaku pemberi kerja. Dahulu keselamatan kerja lebih ditujukan untuk menyelamatkan kepentingan ekonomis perusahaan karena kecelakaan. Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ruang lingkup berlakunya keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Tujuan pemerintah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, esensi dibuat aturan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hakekatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produksi teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dengan adanya aturan tersebut sehingga bahaya kecelakaan dapat dieliminasi/direduksi.² Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja namun juga bagi perusahaan tempatnya bekerja karena akan mengganggu proses produksi. Pengertian keselamatan kerja yaitu suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan

² Wiwoho Soedjono, 1983, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, PT.Bina Aksara, Yogyakarta, hl.46.

penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.³

Sistem ini bertujuan untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Langkah-langkah tindakan preventif untuk menciptakan keselamatan kerja di tempat kerja bagi para buruh/pekerja harus ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Adanya penyelenggaraan penyegaran udara yang cukup;
- b. Mengamankan dan memelihara bangunan serta gedung sebagai tempat kerja para buruh;
- c. Pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
- d. Pemberian kesempatan atau jalan guna menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berhubungan dengan adanya bahaya;
- e. Pencegahan dan pengurangan kecelakaan;
- f. Pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, keracunan, infeksi, maupun penularan;
- g. Terciptanya keserasian antara buruh, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerja;
- h. Terselenggaranya suhu dan lembab udara yang baik; dan
- i. Tersedianya penerangan yang cukup dan sesuai.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan baik secara fisik, mental spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan kerja bagi pekerja merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pengusaha selaku pemberi kerja. Kesehatan kerja merupakan perlindungan sosial karena ketentuan mengenai kesehatan kerja berkaitan dengan sosial kemasyarakatan,

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.170.

⁴ Wiwoho Soedjono, 1983, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, PT.Bina Aksara, Yogyakarta, hlm.46.

yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja “semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku dengan tidak memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.⁵ Berdasarkan Pasal 86 Undnag-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- 1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - (b) Moral dan kesusilaan
 - (c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.

Pelaksanaan kesehatan kerja oleh pengusaha juga memiliki tujuan dan sasaran.

Menurut Suma'mur sasaran pelaksanaan kesehatan kerja yaitu:

- 1) Mencegah dan memberantas penyakit akibat kerja;
- 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan kerja dan gizi pekerja;
- 3) Memberantas kelelahan kerja; dan
- 4) Perlindungan bagi masyarakat sekitar terhadap bahaya yang ditimbulkan.⁶

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas. Upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja itu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

⁵ Zaeni Asyhadie, Op.Cit., hlm.79.

⁶ Suma'mur , 1998, *Higene Perusahaan dan KesehatanKerja*, Haji Masangung, Jakarta, hlm.2.

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya karang-mengarang untuk surat kabar atau majalah.⁷ Menurut Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 1 butir 4 wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam perusahaan media massa dikenal berbagai macam wartawan antara lain wartawan tetap, wartawan koresponden, wartawan kontributor, dan *stringer*. Wartawan dalam menjalankan tugas kewartawanannya harus memiliki pedoman atau acuan yang dapat menjadi pegangan saat melaksanakan tugasnya. Pedoman seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya disebut sebagai kode etik. Kode etik yang dijadikan panutan oleh wartawan adalah kode etik jurnalistik Dewan Pers Nomor: 03/SK_DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik.

Tv One merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang terkemuka di Indonesia. Tv One merupakan stasiun televisi yang dimiliki oleh Visi Media Corporation, dan Tv One didirikan pada tahun 2008 sebelumnya Tv One bernama Lativi berdiri pada tanggal 30 Juli 2002 yang didirikan oleh Abdul Latief Cooperation. Awal mula terbentuknya Kantor Biro Tv One Yogyakarta berdasarkan Pendapat Hendrawan Setiawan sebagai Kepala Biro karena Yogyakarta itu merupakan barometer berita dan untuk meng-*cover* pencarian berita meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kantor Biro Tv One Yogyakarta sendiri terletak di Jalan Pandeyan 1a Umbulharjo Yogyakarta. Kantor Biro Tv One Yogyakarta berdiri pada tahun 2010. Saat ini jumlah karyawan di Kantor Biro Tv One mencapai 9 orang yang terdiri dari seorang kepala biro, dua orang reporter,

⁷ Drs.Suharso,Op.Cit.

seorang *technical director*, seorang kameramen, seorang *driver*, seorang bagian administrasi, seorang *office boy*, dan satu orang bagian *security*. Hingga tahun 2014 kemarin jumlah wartawan tetap di Kantor Biro Tv One Yogyakarta berjumlah 3 orang yang terdiri dari seorang wartawan perempuan dan dua orang wartawan laki-laki dan dibantu wartawan kontributor berjumlah 5 orang yang tersebar di setiap kabupaten maupun kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini diambil responden secara acak dengan menggunakan *random sampling* dan dari 8 kuesioner yang diedarkan hanya dua kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Responden tersebut adalah Nuryanto wartawan kontributor wilayah Kota Yogyakarta dan Hendrawan Setiawan wartawan tetap sekaligus merangkap sebagai Kepala Biro Tv One Yogyakarta. Dari kuesioner yang kembali didapatkan hasil bahwa perjanjian kerja yang ada di Kantor Biro Tv One telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Berkaitan dengan perjanjian kerja yang dibuat antara wartawan kontributor dengan Kantor Biro Tv One, Kantor Biro belum dapat memenuhi ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu dan standart upah minimal regional bagi contributor. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua responden menjawab, bahwa pengaturan sirkulasi udara oleh Kantor Biro telah berjalan dengan baik karena di Kantor Biro terdapat jendela dan ventilasi sebagai jalan keluar masuknya udara ke dalam ruangan., kedua responden menjawab bahwa kondisi bangunan dan gedung tempat kerja masih sangat bagus dan kokoh. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua responden salah satu responden menjawab bahwa untuk keamanan dan kebersihan lingkungan kerja telah berjalan dengan baik karena di

Kantor Biro Tv Oneterdapat seorang *security* yang selalu siaga menjaga keamanan di sekitar kantor dan seorang *office boy* yang membersihkan wilayah kantor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua responden keduanya menjawab bahwa ada jalur evakuasi sebagai jalan untuk menyelamatkan diri apabila di Kantor Biro tersebut terjadi suatu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya berjumlah dua jalur sekaligus terdapat alat pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran atau baya lainnya yang mungkin terjadi. Berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan kedua responden menjawab bahwa kelayakan peralatan kerja yang disediakan oleh Kantor Biro Tv One masih layak untuk digunakan dan dioperasikan, karena peralatan kerja disini seperti yang dijawab oleh kedua responden adalah kamera untuk melakukan liputan dan recorder untuk perekam serta komputer/laptop untuk mengolah hasil data yang diperoleh dari lapangan selalu dilakukan perawatan secara periodic. Berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan kedua responden menjawab bahwa tidak ada pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, keracunan, infeksi, maupun penularan, Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua responden wartawan menjawab bahwa Kator Biro telah melakukan keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, proses dan cara kerja dengan adanya pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan bagi pekerjanya namun pelatihan kerja yang dilakukan Kantor Biro hanya diawal masuk kerja. Berdasarkan hasil penelitian kedua responden menjawab telah ada suhu udara yang baik di Kantor Biro Tv One, hasil penelitian di Kantor Biro Tv One kedua responden juga menjawab Kantor Biro telah memberikan penerangan yang baik guna kelancaran menjalankan pekerjaan. Kantor Biro Tv One

Yogyakarta juga belum melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai kewajiban pemberian alat pelindung diri bagi wartawan seperti memberikan masker, helm pelindung kepala, kaca mata dan jaket anti peluru saat melakukan liputan berita. Kantor Biro Tv One belum melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara maksimal karena pertolongan pertama hanya sebatas pemberian kotak P3K dan itu juga sulit dijangkau oleh wartawan yang sedang bertugas meliput di lapangan. Kantor Biro Tv One Yogyakarta belum melaksanakan ketentuan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja. Kantor Biro Tv One Yogyakarta belum dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai menyediakan makanan yang bergizi di tempat kerja karena Kantor Biro Tv One Yogyakarta menggantikan makanan tersebut dengan uang, dan terkait jaminan kesehatan kerja Kantor Biro Tv One belum memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Biro belum melaksanakan jaminan kesehatan secara menyeluruh terhadap semua pekerjanya karena pekerja kontraknya belum terdaftar dalam jaminan kesehatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Wiwoho Soedjono, 1983, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, PT.Bina Aksara, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Ashyadie, 2007, *Hukum Kerja*, edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suma'mur , 1998, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Haji Masagung, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK_DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan kontributor televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta), bahwa dapat ditarik kesimpulan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta) belum berjalan cukup baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja wartawan belum maksimal seperti, masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, upah wartawan kontrak dibawah standart minimal upah, pelatihan kerja pekerja hanya dilakukan diawal saja; tidak adanya dokter jaga dan transportasi jaga ketika terjadi kecelakaan kerja; belum ada alat pelindung diri bagi wartawan; tidak ada pengecekan kesehatan secara khusus atau secara berkala; belum ada pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, keracunan, infeksi, maupun penularan; belum ada pencegahan dan memberantas penyakit akibat kerja; belum ada pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan kerja dan gizi pekerja seperti memberikan makan yang bergizi; belum memberantas kelelahan kerja seperti jam kerja masih melebihi batas yang seharusnya ditentukan Undang-Undang; dan belum adanya pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh terhadap wartawan kontrak.